



Pemerintah Kota Batam

Rencana Kerja (RENJA)





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2022.

Dalam rangka mengemban amanah misi ke-5 dari Pemerintah Kota Batam dan untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pada tahun 2022, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Rencana Kerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016–2021 dan Rancangan Awal Rencana Strategis BKPSDM Kota Batam Periode 2021-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2022 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama Tahun 2022 dan kiranya dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Batam, 23 Agustus 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM

Dr. HASNAH
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680714 198909 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.1.1.Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	3
1.1.2.Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	4
1.1.3.Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
1.2.Landasan Hukum	6
1.2.1.Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.....	6
1.2.2.Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penggangan.....	7
1.2.3.Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.....	8
1.3.Maksud dan Tujuan.....	9
1.3.1.Maksud.....	9
1.3.2.Tujuan.....	9
1.4.Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM.....	11
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2.3.1.Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	25
2.3.2.Permasalahan dan Hambatan.....	25
2.3.3.Peluang dan Tantangan.....	26
2.3.4.Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2.Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022.....	37
3.3.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.	38
3.4.Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
BAB V PENUTUP.....	60



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.....	12
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.....	23
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2022.....	29
Tabel T-C32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2022.....	35
Tabel 3.1	Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja BPSDM Kota Batam Tahun 2022.....	37
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.....	47
Tabel 4.1	Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2022.....	54



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 2 menyatakan “ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah”.

Pemerintah Kota Batam pada tahun 2020 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Walikota dan Wakil Walikota menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dengan tugas tersebut, maka Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2016-2021 serta Rancangan Awal Renstra BKPSDM Kota Batam tahun 2021-2026 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara mendasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang



memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sebagai salah satu Perangkat Daerah setelah menyusun Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dalam hal ini Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2016-2021 dan Rancangan Awal Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026, Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih hasil Pilkada tahun 2020 melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah sebelum dokumen Rencana Kerja (Renja) ditetapkan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan



pendidikan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepegkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepegkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepegkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai dan memudahkan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya dan mentargetkan capaian kinerja selanjutnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,



sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Selain pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Renja Perangkat Daerah diatur juga pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan dan tatacara penyusunan Renja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap persiapan ini meliputi beberapa hal, yaitu;
 - a. Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja;
 - d. Pengumpulan data dan informasi.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, terdiri dari ;
 - a. Tahap Perumusan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - b. Tahap penyajian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan Forum OPD, Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (*stake holder*), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah, Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam juga mengikuti point-point penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2022 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, maupun usulan Perangkat Daerah terkait melalui Forum OPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Batam, seperti dalam gambar di bawah ini.



1.2. Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 sebagai berikut :

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah, meliputi ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 7 Juli 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2022.
 12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2021 Tanggal 6 Agustus 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2022.
- 1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Peraturan perundang-undangan yang terkait Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi



- Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.1. Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun 2022;
- b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Batam.

1.3.2. Tujuan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 yaitu:

- a. Menselaraskan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Menentukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan;
- c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Rentrsa Perangkat Daerah dan Renja untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan.



Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Dalam RKPD Tahun 2022
 - 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.4 Program dan Kegiatan
- Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
- Bab V DAERAH
- PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2020 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran



2020 mencapai 99,29 % dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 784.312.810,00** (71,79%) dari total pagu anggaran **Rp. 1.092.573.685,22** yang terdiri dari 12 kegiatan dalam 3 program.

Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2020 menurut indikator program dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

K O D E	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2)	Tingkat Reliasasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Urusan Pilihan									
01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran									
01	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
01	Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedia dan terpeliharannya sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Program: Pengelolaan, Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
01	Kegiatan: 1. Penataan Administrasi Kepegawaian ASN	Tersusunnya pola karir dan grand design aparatur	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Persentase pelayanan kenaikan pangkat tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
03	3. Pengelolaan Mutasi Jabatan ASN	Persentase penempatan aparatur sesuai dengan	100%	96,29%	98,74%	94,50%	95,71%	100,00%	100,00%	100,00%



K O D E	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Dasar Daerah/ Kegiatan	kompetensi Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun (2016- 2021) (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) (2020)	Tingkat Reliasasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					8=7/6	9	10=5+7+9			
04	4. Pengelolaan Administrasi Dasar Kepegawaian	Persentase pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, KPE	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
05	5. Peningkatan Kualitas Database Kepegawaian	Persentase OPD yg telah memutakhirkan data ASN	100,00%	100,00%	100,00 %	97,84%	97,84%	100,00%	100,00%	100,00%
06	6. Pengelolaan Data dan Arsip Kepegawaian	Tersedianya media informasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	Program: Pengelolaan, Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yg meningkat kapasitasnya dgn pengembangan kompetensi bersertifikat								
23	1. Bimtek Penyusunan Kompetensi ASN	Tersedianya dokumen panduan kompetensi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
08	2. Pelatihan Dasar Calon PNS Pemko Batam	Persentase ASN yg telah memenuhi syarat diangkat menjadi ASN	100,00%	349 org (99,71%)	5 org (100,00 %)	5 org (100,00%)	5 org (100,00%)	150 org (100,00%)	100,00%	100,00%
10	3. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Meningkatnya jumlah pejabat yg telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan	488 orang	25 orang	0 orang	0 orang	0%	49 orang	74 orang	15,16%
	4. Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan	Meningkatnya jumlah pejabat yg telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	5. Pelaksanaan Diklat Teknis & Fungsional	Persentase ASN yg telah mengikuti diklat bersertifikat	500 orang	380 orang	0 orang	0 orang	0,00%	190 orang	570 orang	114,00%
11	6. Pengiriman Peserta Diklat Teknis & Fungsional	Terlaksananya pengiriman peserta diklat teknis& fungsional	1524 orang	438 orang	0 orang	0 orang	0,00%	30 orang	468 orang	30,71%
13	7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikan	50 orang	22 orang	2 orang	2 orang	100,00%	6 orang	30 orang	60,00%
	8. Pemberian Penghargaan Bagi ASN	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi aparatur	200 orang	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	9. Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	Tersusunnya rencana diklat yg sesuai dengan kebutuhan ASN	1 dokumen	-	-	1 dokumen	100,00%	-	1 dokumen	100,00%
	10. Penyusunan DED Balai Diklat	Tersusunnya rancangan design Balai Diklat	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00%
08	11. Seleksi Calon ASN Pemko Batam	Terpenuhnya kebutuhan ASN Pemko Batam	600 orang	352 orang	140 orang	132 orang	94,29%	400 orang	884 orang	147,34%
15	12. Pelaksanaan Assessment	Terlaksananya seleksi jabatan structural	20 org assessment & 150 org	20 org assessment & 150 org	-	-	-	-	20 org assessment & 150 org	100,00%



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	psikotes	psikotes	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2021)	psikotes	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2016-2021) (2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2019)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2020)	Tingkat Reliasasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Program: Pengelolaan, Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur									
20	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peningkatan pemahaman ASN tentang peraturan perundang-undangan	480 orang	-	-	-	-	-	-	0,00%
21	2. Bimtek Penerapan Peraturan Kepegawaian	Persentase peningkatan kemampuan ASN dalam penerapan aturan kepegawaian	320 orang	-	-	-	-	-	-	0,00%
07	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin aparatur	6 kali/tahun	6 kali/tahun	6 kali/tahun	6 kali/tahun	100%	6 kali/tahun	6 kali/tahun	100,00%
09	4. Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus ASN	100,00%	72 kasus	25 kasus	22 kasus	113,16%	15 kasus	109 kasus	100,00%
16	5. Fasilitasi Profesi ASN	Terwujudnya koordinasi kelembagaan ASN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22	6. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur	Terlaksananya penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	99,47%	99,47%	100,00%	99,83%	99,83%
16	7. Pembinaan Minat dan Bakat ASN Pemerintah Kota Batam	Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

Dari tabel **Tabel T-C.29** dapat dijelaskan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2020 menurut indikator program yang telah mengalami rasionalisasi/refocusing anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian ASN.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem seleksi terbuka JPT Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mendapatkan Pejabat Eselon II yang



berkompetensi. Kegiatan ini dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu seleksi administrasi (rekam jejak) oleh panitia seleksi, asesment oleh tim asesment (penilaian kompetensi), penulisan makalah dan persentasi serta wawancara akhir oleh panitia seleksi. Oleh karena Kota Batam termasuk daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana pada Pasal 71 Ayat (2) menyatakan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, maka kegiatan ini tidak dilaksanakan dan telah mengalami rasionalisasi anggaran dari pagu anggaran pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp. 411.360.000,00 menjadi 0 (nol).

2. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN.

Capaian realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,00 atau sebesar **20,55%** dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.900.000,00. Hal yang menyebabkan penggunaan anggaran yang belum optimal dikarenakan Kota Batam termasuk daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana pada Pasal 71 Ayat (2) menyatakan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Sehingga selama tahun 2020 telah dilakukan 3 (tiga) kali pelaksanaan pelantikan jabatan struktural dan fungsional.



Pelaksanaan mutasi jabatan dapat dilakukan jika telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, itupun hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif sekali. Anggaran yang digunakan adalah honorarium penyelenggara kegiatan (pengukuh sumpah). Oleh karena itu realisasi anggarannya hanya sebesar 20,55%, sedangkan capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 95,71%.

3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Database Kepegawaian.

Kegiatan ini adalah pengembangan aplikasi berupa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) online Kota Batam yang mengadopsi dari sistem kepegawaian e-master Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun karena adanya Pandemi COVID-19 maka rencana mendatangkan Tim IT Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan aplikasi tidak jadi dilakukan. Anggaran semula pada APBD murni sebesar Rp. 43.600.000,00 telah mengalami rasionalisasi/refocusing anggaran menjadi 0 (nol).

4. Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional.

Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan beberapa Lembaga pendidikan di bawah kementerian diantaranya adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), Universitas Diponegoro Semarang, Pusat Pengembangan ASN BKN Ciawi Bogor, Kampus Pusdiklat Pengawasan BPKP Ciawi Bogor, BPSDM Kemendagri Jakarta Pusat, dan sebagainya. Namun karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan ini telah mengalami refocusing anggaran yang mana pada APBD murni sebesar Rp. 811.700.000,00 menjadi 0 (nol).

5. Kegiatan Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional.

Pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan Diklat/ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa milik pemerintah sebanyak 140 orang yang dikelola melalui sistem swakelola dengan berkoordinasi pada LKPP di Jakarta dan rencana Diklat Pelayanan Publik sebanyak 40 orang. Namun karena adanya Pandemi COVID-19 maka anggaran telah mengalami refocusing anggaran dari Rp. 130.975.000,00 menjadi 0 (nol).

6. Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kinerja.

Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan metode swakelola di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kota Batam, dengan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu melakukan penyusunan kamus jabatan, melakukan penyusunan pedoman penilaian kinerja aparatur dan melakukan sosialisasi E-Kinerja. Rencana pelaksanaan sosialisasi E-Kinerja akan dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XII Pekanbaru dengan peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari perwakilan Kasubbag. Umum dan Kepegawaian setiap OPD dan perwakilan setiap bidang/bagian/kelurahan. Dari hasil pelaksanaan penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur diharapkan pegawai dapat menyusun butir kegiatan/kamus jabatan yang akan diinput kedalam aplikasi E-Kinerja sehingga dengan diterapkan E-Kinerja akan dijadikan sebagai pengawasan terhadap aktifitas harian pegawai. Namun karena adanya Pandemi Covid-19 maka kegiatan tidak jadi dilaksanakan dan anggaran telah mengalami refocusing anggaran dari APBD murni 2020 sebesar Rp. 54.650.000,00 menjadi 0 (nol).

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan tersedianya anggaran kegiatan selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 637.423.785,22 telah meningkatkan kinerja aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini sebesar 100,00%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 533.749.810,00 atau 83,74%. Realisasi keuangan kegiatan ini tidak tercapai sesuai target yang telah ditentukan disebabkan adanya rasionalisasi/refocusing anggaran, terutama anggaran belanja perjalanan dinas. Namun capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%.

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan ini merupakan pendukung meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan prima dengan adanya belanja pemeliharaan sehingga terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun. Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100,00%. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 97.944.900,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 78.183.000,00 atau 79,82%. Realisasi keuangan kegiatan ini tidak tercapai



sesuai target yang telah ditentukan disebabkan adanya rasionalisasi/refocusing anggaran. Namun untuk pencapaian kinerja mencapai 100%.

3. Kegiatan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah.

Pada kegiatan ini capaian kinerjanya mencapai 100%, untuk pengelolaan kenaikan pangkat tahun 2020 telah dilakukan sebanyak 2 periode yaitu periode I April 2020 terdapat kenaikan pangkat sebanyak 555 orang PNS yang terdiri Golongan I sebanyak 3 orang, Golongan II sebanyak 92 orang, Golongan III sebanyak 447 orang, sedangkan Golongan IV sebanyak 13 orang. Adapun untuk periode II Oktober 2020 terdapat kenaikan pangkat sebanyak 425 orang PNS yang terdiri dari Golongan I sebanyak 5 orang, Golongan II sebanyak 62 orang, Golongan III sebanyak 344 orang, sedangkan untuk Golongan IV sebanyak 14 orang. Jadi total kenaikan pangkat untuk tahun 2020 adalah sebanyak 980 orang PNS. Untuk ujian dinas penyesuaian Ijazah tahun 2020 tidak dilaksanakan karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut. Namun secara umum untuk pelaksanaan kenaikan pangkat sudah mencapai kinerja 100%. Adapun data ini didapat dari Bidang Mutasi, Kependidikan dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

4. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar.

Anggaran kegiatan ini awalnya pada APBD murni tahun 2020 adalah sebesar Rp. 144.000.000,00 dengan target awal pemberian bantuan tugas belajar pada ASN Pemerintah Kota Batam sebanyak 5 orang, namun telah mengalami perubahan target sebanyak 2 orang dengan anggaran berubah menjadi Rp. 80.000.000,00, adapun capaian realisasi dari kegiatan ini berdasarkan pagu perubahan anggaran APBD adalah sebesar Rp. 80.000.000,00 atau sebesar 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00.

5. Kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS.

Rencana kinerja awal kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon PNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS sebanyak 150 orang, namun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan target kinerja dari



150 orang berubah menjadi 5 orang yang hanya dilaksanakan CPNS formasi PTT Kemenkes. Hal ini disebabkan karena formasi pengadaan CPNS tahun 2019 telah tertunda proses pelaksanaannya akibat Pandemi COVID-19, maka proses pengadaan formasi PNS tahun 2019 baru selesai diakhir tahun 2020 dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pelatihan Dasar Calon PNS di tahun 2020, oleh karena itu anggaran yang telah dianggarkan pada tahun 2020 dilakukan rasionalisasi dan telah dianggarkan kembali pada tahun 2021. Untuk pengukuran kinerjanya jika diukur dari perubahan target maka pencapaiannya adalah 100% (5 orang).

6. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Kegiatan Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN.

Dengan capaian kinerjanya mencapai 113,16%. Target tahun 2020 adalah menangani pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin adalah 0,43% (25 kasus), sedangkan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 0,38% (22 kasus) kasus pelanggaran kedisiplinan. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya peningkatan kedisiplinan ASN Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah cukup baik karena realisasi tidak melebihi dari target yang ditetapkan.

7. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Untuk kegiatan yang pencapaian realisasi fisik mencapai 100% pada umumnya tidak memiliki kendala permasalahan yang berarti, akan tetapi untuk yang pencapaian realisasi fisik tidak mencapai 100% pada tahun ini disebabkan adanya faktor Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia yang berakibat telah dilakukan Refocusing/Rasionalisasi anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun hal tersebut harus tetap menjadi evaluasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam menganggarkan dan melaksanakan kegiatan. Untuk pencapaian target realisasi fisik dan keuangan yang maksimal, diperlukan acuan dalam menjalankan kegiatan, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sehingga dalam menjalankan kegiatan masing-masing pelaksana



kegiatan menjalankan kegiatannya sesuai dengan acuan yang ada pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Permasalahan umum dari semua kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan pegawai untuk masing-masing OPD masih kurang dikarenakan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintah Kota Batam.
- 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini merupakan efek dari kekurangan Pegawai dan berakibat kepada penempatan pegawai yang belum proporsional dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan. Sehingga masih dirasakan beberapa kelemahan baik segi penempatannya maupun pemerataan penempatan pegawai.
- 3) Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tentang pelaksanaan diklat, workshop, bimbingan teknis maupun kursus-kursus yang telah dilaksanakan sehingga pencapaian manfaatnya bisa maksimal dimasa yang akan datang.

8. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian program Renstra perangkat daerah.

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

9. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.

Untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- 1) Melakukan perubahan terhadap target program dan kegiatan pada perjanjian kinerja.
- 2) Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.



- 3) Merencanakan target fisik dan keuangan yang seimbang agar pencapaiannya maksimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan,



- penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepegawaian dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut di atas maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2) Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat;
- 3) Persentase peningkatan penegakan disiplin aparatur.

Sedangkan untuk indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam jika berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase penyelesaian pelayanan informasi kepegawaian;
- 2) Persentase peningkatan kinerja dan disiplin ASN;
- 3) Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase SKPD Yang Telah Memutakhirkan Data ASN	-	-	80%	80%	100%	100%	97,84%	80%	100%	100%	
3	Persentase Pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen dan KPE	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Calon ASN yang Telah Memenuhi Syarat Diangkat Menjadi ASN	-	-	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	5 orang	120 orang	120 orang	120 orang	
5	Meningkatnya Jumlah Pejabat yang Telah Memenuhi Syarat Untuk Menduduki Jabatan	-	-	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	-	120 orang	120 orang	120 orang	
6	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Bersertifikat	-	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	100 orang	100 orang	100 orang	
7	Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	-	-	370 Orang	370 Orang	370 Orang	370 Orang	-	370 Orang	370 Orang	370 Orang	
8	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	2 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	
9	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur	-	-	50 orang	50 orang	50 Orang	50 Orang	-	50 orang	50 Orang	50 Orang	
10	Terpenuhinya Kebutuhan ASN Pemko Batam	-	-	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	132 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	



Rencana Kerja Tahun 2022

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman ASN Tentang Peraturan Perundang-undangan	-	-	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	-	120 orang	120 orang	120 orang	
12	Jumlah Peningkatan Kemampuan ASN Dalam Penerapan Aturan Kepegawaian	-	-	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	-	80 orang	80 orang	80 orang	
13	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Kasus ASN	-	-	100%	100%	100%	100%	113,16%	100%	100%	100%	
14	Terwujudnya Koordinasi Kelembagaan ASN	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
15	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	99,47%	100%	100%	100%	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat daerah.

Faktor-faktor pendorong bagi tercapainya kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peluang pengisian formasi yang kurang melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. Proses rekrutmen pegawai yang terbuka dan transparan telah menggunakan CAT;
- d. Penilaian kemampuan ASN melalui *assessment*;
- e. Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kebijakan tugas belajar, ijin belajar dan kediklatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan.

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah:

- a. Kebutuhan pegawai semakin meningkat sementara formasi kebutuhan yang diusulkan sekitar 30% yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan banyaknya pegawai yang pension setiap tahun;
- b. Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang ASN belum keluar sehingga pengambilan keputusan berkaitan kepegawaian masih berupa kebijakan dan belum memiliki dasar hukum;
- c. Adanya kebijakan daerah yang terkadang kurang selaras dengan kebijakan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit;
- d. Pengalokasian anggaran untuk Diklat pegawai sangat terbatas;
- e. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi dan kualifikasi jabatan;



- f. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian yang masih kurang;
- g. Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara Kota Batam.

2.3.3. Peluang dan Tantangan.

Adapun Peluang dalam peningkatan kinerja pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
- d. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik *e-government* (*e.gov*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Tantangan dalam peningkatan kinerja pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*);
- b. Formasi pegawai negeri sipil yang masih sentralistik;
- c. Penerapan Prinsip *Spoil System* Dalam Pembinaan Pegawai; Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mencoba beberapa strategi yang diharapkan dapat meminimalkan permasalahan yang ada. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan, menjaga, memupuk rasa kebersamaan, loyalitas antar sesama pegawai dan mengoptimalkan potensi pegawai yang relatif berusia muda untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Batam;
- b. Memanfaatkan akses yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur;
- c. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui Diklat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Batam;



- d. Meningkatkan kemitraan antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan lembaga Diklat baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan SDM Pegawai Pemerintah Kota Batam;
- e. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang professional;
- f. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam pembinaan Sumber Daya Aparatur;
- g. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS Pemerintah Kota Batam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengikuti perkembangan informasi yang begitu cepat;
- h. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- i. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan structural;
- j. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan melaksanakan kegiatan evaluasi kedisiplinan dan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila telah menunjukkan kesetiaan, jasa atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- k. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2022, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2022.

Dalam perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2022 menjadi Rencana Kerja



BKPSDM Kota Batam tahun 2022, dibutuhkan penyesuaian rencana kerja melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2022. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada **tabel T-C.31** berikut:



Rencana Kerja Tahun 2022

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kota Batam Tahun 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembar 1 dari 6

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Terpenuhi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,00%	14.018.219.527	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Terpenuhi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	13.859.144.085	
I.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	98,00%	12.307.854.407	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100,00%	12.128.373.791	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah PNS BKPSDM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	50 orang	12.255.714.407	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah PNS BKPSDM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	52 orang	12.099.633.791	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	5 orang dan 750 lembar materai	52.140.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	2 orang	28.740.000	
			Jumlah belanja materai	750 lembar				Jumlah belanja materai	750 lembar		
II.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	95,00%	182.625.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	-	0	Menyesuaikan target Ranwal Renstra
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Batam	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin aparatur	6 unit	37.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Batam	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin aparatur	-	0	
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	145.125.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0	
III.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,00%	1.306.604.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	777.372.262	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	2.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	6.081.000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	65 jenis	676.473.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43 jenis	193.490.570	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	18 jenis	73.869.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 jenis	5.791.692	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	65.446.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	64.569.000	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	7.200.000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81 kali	481.015.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 kali	500.240.000	
IV.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	0	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100%	624.182.000	Menyesuaikan dgn Ranwal Renstra
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	14 jenis	624.182.000	
V.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,00%	89.602.720	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	95.096.032	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Kg	5.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Kg	10.800.000	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	84.202.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	84.296.032	
VI.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	91,00%	131.533.400	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100,00%	234.120.000	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	23.072.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	39.780.000	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 unit	65.071.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 unit	140.100.000	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	87 jenis	43.390.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	75 jenis	54.240.000	
B.	Program Kepegawaian Daerah	Batam	Persentase Penyelesaian Pelayanan Infomasi Kepegawaian	98,00%	3.952.420.400	Program Kepegawaian Daerah	Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	90,75%	1.884.327.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Batam	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	87,00%	1.722.610.000	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Batam	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	85,50%	1.127.062.000	
1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Batam	Jumlah pengadaan CPNS Pemerintah Kota Batam	400 orang	1.337.386.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Batam	Jumlah pengadaan CPNS Pemerintah Kota Batam	400 orang	994.711.450	
			Jumlah pengadaan PPPK Pemerintah Kota Batam	600 orang				Jumlah pengadaan PPPK Pemerintah Kota Batam	600 orang		
2.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Batam	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	9 Lembaga	159.694.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Batam	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	9 Lembaga	0	
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Batam	Jumlah aplikasi yang dikelola (SIMPEG)	1 Aplikasi SIMPEG	225.530.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Batam	Jumlah aplikasi yang dikelola (SIMPEG)	1 Aplikasi SIMPEG	132.351.000	
II.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Batam	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	96,00%	803.342.000	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Batam	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	96,00%	757.265.000	
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Batam	Jumlah kelompok mutasi ASN yang dikelola	3 Kelompok (Struktural, Fungsional & Pelaksana)	64.320.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Batam	Jumlah kelompok mutasi ASN yang dikelola	3 Kelompok (JPT, Jabatan Administrasi & Jabatan Fungsional)	70.820.000	
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Batam	Jumlah ASN yang naik pangkat	850 orang	232.152.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Batam	Jumlah ASN yang naik pangkat	850 orang	150.875.000	
			Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas/penyesuaian ijazah	500 orang				Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas/penyesuaian ijazah	200 orang		
3.	Pengelolaan Promosi ASN	Batam	Jumlah promosi jabatan ASN yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	10 JPT	506.870.000	Pengelolaan Promosi ASN	Batam	Jumlah promosi jabatan ASN yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	10 JPT	535.570.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi S1/DIV	3812 orang	1.252.160.400	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi S1/DIV	3812 orang	542.857.600	
			Jumlah ASN Berkualifikasi S2	385 orang				Jumlah ASN Berkualifikasi S2	385 orang		
			Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2688 orang				Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2636 orang		
1.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Batam	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	220 Orang	720.160.400	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Batam	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	0 Orang	0	Pindah Program
2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Batam	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	10 Orang	532.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Batam	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	5 Orang	212.000.000	
IV.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5500 orang	174.308.000	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5500 orang	103.732.000	
			Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	76,33%				Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	76,33%		
1.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Batam	Jumlah laporan monitoring evaluasi penilaian kinerja ASN	1 laporan	94.400.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Batam	Jumlah laporan monitoring evaluasi penilaian kinerja ASN	1 laporan	41.630.000	
2.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Batam	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	5 orang	17.250.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Batam	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	5 orang	15.746.000	
3.	Pembinaan Disiplin ASN	Batam	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	55 orang	62.658.000	Pembinaan Disiplin ASN	Batam	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	55 orang	46.356.000	
C.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Batam	Persentase Jabatan Yg Sesuai Dgn Kualifikasinya	42,23%	9.997.920.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan dan Kompetensinya	51,97%	5.841.612.300	
I.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	0	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	11%	706.670.300	Renaksi Walikota



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Batam	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	0 orang	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Batam	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	220 orang	706.670.300	Renaksi Walikota
II.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	53,68%	9.997.920.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	45,03%	5.134.942.000	Renaksi Walikota
			Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100%				Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100%		
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, & Prajabatan	Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PIM	106 orang	9.997.920.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, & Prajabatan	Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PIM	54 orang	5.134.942.000	Renaksi Walikota
			Jumlah ASN yang mengikuti LATSAR CPNS	400 orang				Jumlah ASN yang mengikuti LATSAR CPNS	325 orang		
TOTAL					27.968.559.927					21.900.815.385	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai tugas di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang bersentuhan langsung dengan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam merupakan program dan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Usulan masyarakat yang terangkum dalam RKPD Kota Batam tahun 2022 menjelaskan tidak adanya usulan masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022. Untuk lebih jelasnya mengenai Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terhadap Rencana Kerja tahun 2022 dapat dilihat pada **tabel T-C.32** berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2022

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Mendorong Investasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selaku pelaksanaan kebijakan publik, yaitu “**Reformasi Birokrasi**” agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini BKPSDM Kota Batam menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih profesional.



Tabel 3.1
Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja
BKPSDM Kota Batam Tahun 2022

No.	Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024)	Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam Tahun 2022
1.	"Reformasi Birokrasi" yaitu Reformasi Struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, <i>mindset</i> berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga	Meningkatkan Sistem Pelayanan Prima Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Meningkatkan Kompetensi ASN Dengan Pemetaan Jabatan Berbasis Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Melakukan Pembinaan Dan Penegakan Peraturan Kepegawaian

Sasaran utama Pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan diteruskan dalam sasaran kinerja BKPSDM Kota Batam tahun 2022 dengan cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sementara itu sasaran utama pemerintah dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional didukung BKPSDM Kota Batam melalui sasaran kinerja BKPSDM Kota Batam tahun 2022 dengan sasaran kinerja pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepegawaian serta membangun SDM aparatur yang berkepribadian, kompeten dan kompetitif.

3.2. Tema, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022.

Tema Pembangunan Kota Batam tahun 2022 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani dan Sejahtera”.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Batam yaitu :

***“Terwujudnya Batam Sebagai bandar Dunia Madani
Yang Modern dan Sejahtera”.***



Sedangkan Prioritas Pembangunan Kota Batam tahun 2022 yaitu :

1. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berkeadilan di mainland dan hinterland.
2. Pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan di mainland dan hinterland.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland.
4. Peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah.
5. Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masuk pada prioritas pembangunan yang ke-5 yaitu “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat” dengan fokus pada pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur serta peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas dilaksanakan melalui Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah :

“Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”



Maka strategi yang diletakkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pelayanan prima;
Adapun untuk menjalankan strategi tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan melakukan pemutakhiran data ASN sesuai peraturan BKN dan melakukan mutasi dan promosi ASN sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi ASN;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Strategi tersebut di atas akan dicapai melalui arah kebijakan yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak penyelenggara Diklat dalam pengembangan kapasitas ASN;
3. Meningkatkan kompetensi ASN dengan pemetaan jabatan berbasis analisis jabatan Dan analisis beban kerja;
Strategi tersebut di atas akan dicapai melalui arah kebijakan menyelenggarakan *assessment center*;
4. Melakukan pembinaan dan penegakan peraturan kepegawaian.

Sedangkan strategi selanjutnya dicapai dengan arah kebijakan yaitu meminimalisir pelanggaran disiplin dengan pola pembinaan dan penegakan aturan kepegawaian serta meningkatkan kinerja ASN dengan cara memberikan penghargaan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai. Sasaran yang diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 5 (lima) tahun kedepan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian;



2. Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan;

3.4. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masuk pada kewenangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama 1 tahun. Pada sub kegiatan ini terdiri dari belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS serta tambahan tunjangan penghasilan PNS. Dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkat semangat pengabdian untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.



- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Sub Kegiatan ini merupakan penyediaan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran dan pengurus barang), pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai) selama 1 tahun.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Pegawai.
Sub kegiatan ini merupakan pengadaan belanja modal mesin absensi berupa scan jari portable sebanyak 6 unit yang digunakan untuk absensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
Sub kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisai peraturan perundang-undangan untuk pegawai BKPSDM Kota Batam agar lebih mamahami dan mengerti aturan-aturan terutama aturan yang berkaitan dengan kepegawaian, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Sub kegiatan ini adalah merupakan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yaitu penyediaan baterai untuk keperluan kantor selama 1 tahun.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Sub kegiatan ini terdiri dari belanja operasi (belanja barang dan jasa) serta belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin). Dengan terlaksananya kegiatan ini akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
 - c. Penyediaan bahan Logistik Kantor.
Sub kegiatan ini terdiri dari belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor.



- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 tahun.
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
Sub kegiatan ini adalah untuk kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun seperti koran/majalah dan buku.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Sub kegiatan ini adalah untuk perjalanan dinas untuk pegawai BKPSDM dalam rangka menunjang penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke dalam maupun ke luar daerah.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Sub kegiatan ini merupakan pengadaan barang milik daerah berupa belanja modal.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Sub kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengiriman berkas atau dokumen untuk keperluan kantor.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor seperti tenaga honorarium kontrak.
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Sub kegiatan ini merupakan penyediaan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk mobil kepala badan selama 1 (satu) tahun.



b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.

Sub kegiatan ini merupakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kendaraan dinas sebanyak 4 unit selama 1 (satu) tahun.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub kegiatan ini merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor selama 1 (satu) berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, acces door, dan lain-lain.

II. Program Kepegawaian Daerah.

Program Kepegawaian daerah adalah merupakan program melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari; penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota. Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Sub kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan



Pemerintah Kota Batam. Sehingga dengan terlaksananya sub kegiatan ini akan terpenuhinya kebutuhan ASN pada Pemerintah Kota Batam.

b. Fasilitasi Profesi Lembaga ASN.

Sub kegiatan ini merupakan fasilitasi profesi ASN terhadap beberapa lembaga seperti TASPEN, BKN, BPJS, DIRJEN PAJAK, TAPERA, KEMENDAGRI, KORPRI, KEMENPAN RB, BPS, dengan adanya fasilitasi terhadap lembaga-lembaga tersebut maka akan memperlancar terhadap pelayanan administrasi kepegawaian ASN Pemerintah Kota Batam.

c. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan aplikasi SIMPEG yang ada pada BKPSDM Kota Batam, berupa kegiatan pengembangan aplikasi terhadap fitur-fitur aplikasi secara mandiri maupun mendatangkan tenaga ahli dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan aplikasi tersebut.

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Mutasi ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi ASN terhadap jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kebijakan mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan pelayanan publik. Profesionalisme dalam tugas dan tanggungjawab menjadi pegangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, dengan berkoordinasi dengan Baperjakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Batam.

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melayani Aparatur Sipil Negara dalam mengurus kenaikan pangkat, ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

c. Pengelolaan Promosi ASN.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pejabat yang mengalami promosi jabatan, diantaranya yaitu salah satunya untuk pengelolaan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.



3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, baik berupa pengiriman peserta maupun pelaksanaan Diklat secara mandiri yang bekerjasama dengan lembaga penyelenggara yang telah terakreditasi. (sub kegiatan ini pindah program ke program pengembangan sumber daya manusia pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis)
 - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan dengan melalui pengiriman tugas belajar bagi ASN.
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Sub kegiatan ini merupakan monitoring evaluasi terhadap penilaian kinerja ASN Pemerintah Kota Batam.
 - b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai yang disiplin, berprestasi dan berkinerja baik serta berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang profesional.
 - c. Pembinaan Disiplin ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap para ASN yang mengalami berbagai permasalahan kepegawaian dan rumah tangga, sehingga dengan adanya sub kegiatan ini ASN akan diarahkan untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar adanya peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya.



III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Reformasi birokrasi pada pemerintahan pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor pemerintahan pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi tersebut. Oleh karena itu segala kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar kompetensi yang profesional. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
Sub kegiatan ini merupakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi baik untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional maupun melalui pengiriman peserta Diklat keluar daerah.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
Sub kegiatan ini merupakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Eselon II, sertifikasi untuk pejabat fungsional yang akan menduduki Jabatan Fungsional, Diklat



Kepemimpinan baik untuk Eselon II, III, dan IV, dan Prajabatan bagi CPNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.



Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

Lembar 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5.03.	KEPEGAWAIAN				Rp. 16.059.203.085				Rp. 19.007.324.952
5.03.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terebutuhnya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	100,00%	Rp. 13.859.144.085	APBD		100,00%	Rp. 15.681.905.952
5.03.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terebutuhi	Batam	100,00%	Rp. 12.128.373.791	APBD		100,00%	Rp. 12.129.361.791
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BKPSDM Kota Batam Yang Menerima Gaji dan tunjangan	Batam	52 orang	Rp. 12.099.633.791	APBD		52 orang	Rp. 12.099.633.791
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	2 orang	Rp. 28.740.000	APBD		2 orang	Rp. 29.728.000
		Jumlah Belanja Materai		750 lembar				1.000 lembar	
5.03.01.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terebutuhi	Batam	-	-	-		100,00%	Rp. 125.125.000
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Batam	-	-	-		-	-
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Batam	-	-	-		100 orang	Rp. 125.125.000
5.03.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	100,00%	Rp. 777.372.262	APBD		100,00%	Rp. 976.497.000



Rencana Kerja Tahun 2022

Lembar 2 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	12 bulan	Rp. 6.081.000	APBD		12 bulan	Rp. 6.081.000
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Batam	48 jenis	Rp. 193.490.570	APBD		48 jenis	Rp. 193.490.570
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Batam	12 jenis	Rp. 5.791.692	APBD		12 jenis	Rp. 5.998.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	6 jenis	Rp. 64.569.000	APBD		8 jenis	Rp. 66.869.000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	2 jenis	Rp. 7.200.000	APBD		2 jenis	Rp. 7.200.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	86 kali	Rp. 500.240.000	APBD		90 kali	Rp. 518.000.000
5.03.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Batam	100,00%	Rp. 624.182.000	APBD		100,00%	Rp. 580.000.000
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Batam	14 jenis	Rp. 624.182.000	APBD		18 jenis	Rp. 580.000.000
5.03.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	100,00%	Rp. 95.096.032	APBD		100,00%	Rp. 98.099.000
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Batam	300 Kg	Rp. 10.800.000	APBD		300 Kg	Rp. 10.800.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	2 orang	Rp. 84.296.032	APBD		2 orang	Rp. 87.299.000



Rencana Kerja Tahun 2022

Lembar 3 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Batam	100,00%	Rp. 234.120.000	APBD		100,00%	Rp. 234.120.000
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Batam	1 Unit	Rp. 39.780.000	APBD		1 Unit	Rp. 39.780.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Batam	4 Unit	Rp. 140.100.000	APBD		4 Unit	Rp. 140.100.000
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Batam	75 Unit	Rp. 54.240.000	APBD		75 Unit	Rp. 54.240.000
5.03.02.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Penempatan ASN	Batam	90,75%	Rp. 2.972.291.750	APBD		91,35%	Rp. 3.325.419.000
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	Batam	85,50%	Rp. 1.334.554.650	APBD		86,50%	Rp. 1.871.209.000
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Batam	Batam	400 orang	Rp. 994.711.000	APBD		400 orang	Rp. 994.711.000
		Jumlah Pengadaan PPPK Pemerintah Kota Batam	Batam	600 orang				1000 orang	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Batam	9 Lembaga	Rp. 0	APBD		9 Lembaga	Rp. 115.000.000



Rencana Kerja Tahun 2022

Lembar 4 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dikelola (SIMPEG)	Batam	1 Aplikasi SIMPEG	Rp. 132.351.500	APBD		1 Aplikasi SIMPEG	Rp. 132.351.000
5.03.02.2.02.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	Batam	96,00%	Rp. 827.158.700			96,20%	Rp. 867.152.000
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutaasi ASN	Jumlah kelompok mutasi ASN yang dikelola	Batam	3 Kelompok	Rp. 70.820.000	APBD		3 Kelompok	Rp. 73.340.000
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN Yang Naik Pangkat	Batam	850 orang	Rp. 150.875.000	APBD		900 orang	Rp. 150.875.000
		Jumlah ASN Yang Mengikuti Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah		200 orang				200 orang	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan ASN Yang Akan Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Batam	10 JPT	Rp. 535.570.000	APBD		10 JPT	Rp. 535.570.000
5.03.02.2.03.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi S1/DIV	Batam	3812 orang	Rp. 542.857.600	APBD		3817 orang	Rp. 400.000.000
		Jumlah ASN Berkualifikasi S2		385 orang				388 orang	
		Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi		2636 orang				2790 orang	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Batam	0 orang	Rp.0	APBD	Pindah program	0 orang	Rp.0
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Tugas Belajar	Batam	5 orang	Rp. 212.000.000	APBD		5 orang	Rp. 212.000.000
5.03.02.2.04.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	Batam	5500 orang	Rp. 267.720.800	APBD		5500 orang	Rp. 187.058.000
		Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan		76,33%				77,83%	



Rencana Kerja Tahun 2022

Lembar 5 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan monitoring evaluasi penilaian kinerja ASN	Batam	1 laporan	Rp. 41.630.000	APBD		1 laporan	Rp. 43.113.000
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pegawai Yang Menerima Penghargaan	Batam	5 orang	Rp. 15.746.000	APBD		10 orang	Rp. 30.000.000
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Disiplin	Batam	55 orang	Rp. 46.356.000	APBD		55 orang	Rp. 46.356.000
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Batam		Rp. 5.841.612.300	APBD			Rp. 5.755.102.000
5.04.02.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Batam	61.97%	Rp. 5.841.612.300	APBD		65.59%	Rp. 5.755.102.000
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Batam	11,00%	Rp. 706.670.300	APBD		12.00%	Rp. 620.160.000
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Batam	220 orang	Rp. 706.670.300	APBD	Menyesuaikan dgn Renaksi Walikota	150 Orang	Rp. 620.160.000
5.04.02.2.02.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	Batam	45,03%	Rp. 5.134.942.942	APBD		49.66%	Rp. 5.134.942.000
		Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS		100,00%				100.00%	



Rencana Kerja Tahun 2022

Lembar 6 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat PIM (Eselon II = 4 orang, Eselon III = 10 orang, Eselon IV = 40 orang) Jumlah ASN Yang Mengikuti Latsar CPNS	Batam	54 orang 325 orang	Rp. 5.134.942.000	APBD		54 orang 325 orang	Rp. 5.134.942.000
JUMLAH RENCANA ANGGARAN					Rp. 21.900.815.385				Rp. 23.966.662.361



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya suatu kegiatan. Kedudukan perencanaan kinerja merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi yang akan mengarahkan instansinya kepada pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Rencana Kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dalam organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat pelaksana.

Berikut disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun anggaran 2022 pada tabel 4.1 berikut ini :



Rencana Kerja Tahun 2022

KODE						RKPD TAHUN 2022					OPD PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB			
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA				
5	03	01	2	06		KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					777.372.262,00	-	-	BKPSDM
5	03	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam		6.081.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		12 bulan	6.081.000,00				
5	03	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam		193.490.570,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		31 jenis	45.847.970,00				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3 jenis	19.511.700,00				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		14 jenis	128.130.900,00				
5	03	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam		5.791.692,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Bahan-Bahan Kimia		5 jenis	3.542.000,00				
							Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		7 jenis	2.249.692,00				
5	03	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam		64.569.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6 jenis	64.569.000,00				
5	03	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam		7.200.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		2 jenis	7.200.000,00				
5	03	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam		500.240.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa		86 kali	500.240.000,00				
5	03	01	2	07		KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					624.182.000,00	-	-	BKPSDM
5	03	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam		624.182.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		7 unit	45.360.000,00				
							Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		2 unit	11.765.000,00				
							Belanja Modal Alat Pendingin		8 unit	69.876.000,00				
							Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1 unit	6.300.000,00				
							Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		6 unit	29.106.000,00				
							Belanja Modal Meja Kursi Pejabat		12 unit	33.000.000,00				
							Belanja Modal Personal Computer		6 unit	132.000.000,00				
							Belanja Modal Peralatan Mainframe		2 unit	6.300.000,00				
							Belanja Modal Peralatan Personal Computer		7 unit	95.475.000,00				
							Belanja Modal Peralatan Jaringan		1 unit	195.000.000,00				
5	03	01	2	08		KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					95.096.032,00	-	-	BKPSDM
5	03	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam		10.800.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Paket/Pengiriman		300 Kg	10.800.000,00				
5	03	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam		84.296.032,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2 orang	79.300.000,00				
							Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2 orang	4.200.000,00				
							Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		2 orang	199.008,00				



Rencana Kerja Tahun 2022

KODE						RKPD TAHUN 2022					OPD PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB	
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
						Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN		2 orang	597.024,00			
5	03	01	2	09		KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			234.120.000,00	-	-	BKPSDM
5	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam		39.780.000,00	-	-	BKPSDM
						Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		1 unit	1.500.000,00			
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang		1 unit	38.280.000,00			
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam		140.10.000,00	-	-	BKPSDM
						Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		4 unit	6.700.000,00			
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang		4 unit	133.400.000,00			
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam		54.240.000,00	-	-	BKPSDM
						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		4 unit	4.800.000,00			
						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		3 unit	1.830.000,00			
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer		25 unit	18.250.000,00			
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		7 unit	5.110.000,00			
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		36 unit	24.250.000,00			
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			2.200.059.000,00	-	-	BKPSDM
5	03	02	2	01		KEGIATAN : PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN			1.127.062.000,00	-	-	BKPSDM
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam		994.711.000,00	-	-	BKPSDM
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8 rim	4.000.000,00			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		10 pack	535.000,00			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		-	0			
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 paket	358.475.000,00			
						Honorarium Rohaniawan		6 orang	2.400.000,00			
						Honorarium Penyelenggara Ujian		6 orang	3.000.000,00			
						Belanja Jasa Tenaga Ahli		22 orang	52.500.000,00			
						Belanja Sewa Komputer Jaringan		4683 orang	491.715.000,00			
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa		10 orang	82.086.000,00			
5	03	02	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam		0	-	-	BKPSDM
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	0			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		-	0			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		-	0			



Rencana Kerja Tahun 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN						RKPD TAHUN 2022				OPD PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB		
	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN						LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA				
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam			132.351.000,00	-	-	BKPSDM
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				0			
						Belanja Jasa Tenaga Ahli				0			
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				0			
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.100 buah	18.312.000,00		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				-	0		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				12 unit	15.000.000,00		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				11 unit	2.651.000,00		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1 paket	26.400.000,00		
						Belanja Jasa Tenaga Ahli				4 orang	19.320.000,00		
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				4 orang	50.668.000,00		
5	03	02	2	02		KEGIATAN : MUTASI DAN PROMOSI ASN				757.265.000,00	-	-	BKPSDM
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Batam			70.820.000,00	-	-	BKPSDM
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1 Paket	3.500.000,00		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				-	0		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				-	0		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1 paket	52.920.000,00		
						Honorarium Rohaniawan				36 orang/kali	14.400.000,00		
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam			150.875.000,00	-	-	BKPSDM
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				4 rim	2.000.000,00		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				1 Paket	0		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1 Paket	0		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1 Paket	14.095.000,00		
						Belanja Jasa Tenaga Ahli				8 orang	54.180.000,00		
						Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				200 orang	20.000.000,00		
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				8 orang	60.600.000,00		
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam			535.570.000,00	-	-	BKPSDM
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1 Paket	3.500.000,00		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				1 Paket	0		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1 Paket	5.778.000,00		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1 Paket	39.312.000,00		
						Honorarium Penyelenggara Ujian				5 orang	60.000.000,00		
						Honorarium Jasa Tenaga Ahli				3 orang	126.900.000,00		
						Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				50 orang	224.000.000,00		
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa				5 orang	76.080.000,00		



Rencana Kerja Tahun 2022

KODE						RKPD TAHUN 2022					OPD PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB			
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA				
5	03	02	2	03		KEGIATAN : PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN					212.000.000,00	-	-	BKPSDM
5	03	02	2	03	03		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kota Batam		0	-	-	BKPSDM	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		-	0				
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-	0				
							Belanja Jasa Tenaga Ahli		-	0				
							Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium		-	0				
							Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan		-	0				
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa		-	0				
5	03	02	2	03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam		212.000.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		-	0				
							Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2		5 orang	212.000.000				
5	03	02	2	04		KEGIATAN : PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR					103.732.000,00	-	-	BKPSDM
5	03	02	2	04	03		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam		41.630.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		-	0				
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat		200 orang	18.200.000,00				
							Belanja Jasa Tenaga Ahli		2 orang	8.280.000,00				
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2 orang	15.150.000,00				
5	03	02	2	04	06		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam		15.746.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		-	0				
							Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata		5 orang	6.250.000,00				
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1 Paket	2.820.000,00				
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1 orang	6.676.000,00				
5	03	02	2	04	07		Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam		46.356.000,00	-	-	BKPSDM	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		-	0				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		-	0				
							Belanja Jasa Tenaga Ahli		4 orang	31.140.000,00				
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3 orang	15.216.000,00				



Rencana Kerja Tahun 2022

KODE						RKPD TAHUN 2022						OPD PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB				
						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN/PEKERJAAN				LOKASI		VOLUME	SUMBER DANA		
5	04					BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						5.841.612.300,00	-	-	BKPSDM	
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						5.841.612.300,00	-	-	BKPSDM	
5	04	02	2	01		KEGIATAN : PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS						706.670.300,00			BKPSDM	
5	04	02	2	01	03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				Kota Batam		706.670.300,00	-	-	BKPSDM
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1 Paket	12.337.500,00			
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1 Paket	658.800,00			
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1 Paket	0			
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1 Paket	38.000.000,00			
							Belanja Jasa Tenaga Ahli					6 orang	19.320.000,00			
							Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium					8 ruang	56.000.000,00			
							Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					30 orang	275.500.000,00			
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa					34 orang	304.854.000,00			
5	04	02	2	02		KEGIATAN : SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANJERIAL DAN FUNGSIONAL						5.134.942.000,00	-	-	BKPSDM	
5	04	02	2	02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Kota Batam		5.134.942.000,00	-	-	BKPSDM
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					-	0			
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					-	0			
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					-	0			
							# Pelatihan Dasar Calon PNS									
							Belanja Sewa kendaraan bermotor penumpang					-	0			
							Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan					325 orang	3.323.320.000,00			
							# Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan									
							Belanja Diklat Kepemimpinan									
							Belanja Diklat PIM II					4 orang	240.000.000,00			
							Belanja Diklat PIM III					10 orang	500.000.000,00			
							Belanja Diklat PIM IV					40 orang	1.040.000.000,00			
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4 orang	31.622.000,00			



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kota Batam tahun 2016 – 2021 serta Rancangan Awal Renstra BKPSDM tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stake holder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama;
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.

Peran serta maksimal dari seluruh bidang maupun sekretariat sebagai penunjang pelaksanaan bidang dalam memberikan pelayanan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab bidang dan sekretariat dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam kedepannya.



Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2022 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan pegawai lainnya yang menginginkan pelayanan seperti pindah baik mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam maupun sebaliknya mutasi keluar dari Pemerintah Kota Batam.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun anggaran 2022 dengan memilih kegiatan tertentu sebagai kegiatan prioritas diantaranya dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
6. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
7. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
8. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
9. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
11. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
12. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dengan terlaksananya kegiatan prioritas tersebut diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang handal, profesional, bermoral dan modern yang selaras dengan Visi Kota Batam tahun 2022 yaitu **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”**, dengan tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia**



Rencana Kerja Tahun 2022

Madani Yang Modern dan Sejahtera". Sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam termasuk pada Prioritas Pembangunan yaitu "Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat" dengan Fokus "Pemberian Sanksi dan Penghargaan Terhadap Kinerja Aparatur serta Peningkatan Disiplin, Kualitas Kerja, Dan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik Melalui Pendidikan dan Pelatihan". Hal ini terwujud dengan adanya "Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia".

Batam, 23 Agustus 2021
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kota Batam



Dra. HASNAH

Pemimpin Utama Muda/IVc

NP. 19580714 198909 2 001